



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **N**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agenda pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan. Pembangunan nasional khususnya di negara berkembang, tidak bisa terlepas dari wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di negara berkembang masih bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan dinegara berkembang dapat dilihat dari perkembangan diwilayah pedesaan itu sendiri (Yustika, 2003:27).

Kemiskinan bukanlah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah menambah jumlah masyarakat yang berada digaris kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu dihadapi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat (Panjaitan, 2000: 7).

Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan kondisi suatu masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan,

papan, kesehatan, pendidikan dasar, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit dikenali dan ditarik garis batas secara umum mengingat berbagai perbedaan yang melatarbelakangi. Oleh karena itu kemiskinan selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan memungkinkan untuk dihilangkan.

Permasalahan kemiskinan yang multidimensional tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Kemiskinan yang multidimensional adalah kemiskinan mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam (Ala, 1981: 26). Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari dua aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan miskin asset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan ketrampilan. Aspek sekunder merupakan miskin akan jaringan sosial, sumber- sumber keuangan dan informasi. Perwujudan dari dimensi kemiskinan ini dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Saat ini telah banyak lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berusaha menanggulangi kemiskinan melalui pemberian pelayanan bantuan kredit kepada masyarakat kecil yang bergerak dalam usaha skala mikro dan sektor informal. Pinjaman dalam bentuk micro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan (Robinson, 2000: 20). Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka yang mencakup: pertama, masyarakat

sangat miskin

(*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Akan tetapi usaha-usaha tersebut sering menghadapi berbagai masalah, baik dari sisi pemberi kredit maupun dari sisi penerima kredit. Para pemberi dana tentunya mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam mengalokasikan kreditnya dan pengalokasian dana tersebut umumnya belum menyentuh masyarakat miskin.

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh Pemerintah sejak era Orde Baru hingga saat ini. Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan yaitu : Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Industri Kecil (KIK), Kredit Canda Kulak (KCK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Padat Karya, Jaring Pengaman Sosial- Program Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (JPS-PDMDKE), Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), P4K, TPSP-KUD, Unit Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial terhadap orang lain/intervensi dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan

mengenalkan sistem kredit mikro yang bisa di akses oleh kaum miskin dengan tanpa agunan dan syarat yang tidak memberatkan. Sistem tersebut yaitu sistem *Grameen* bank yang merupakan ide dan terobosan terbesar dari Prof. Muhammad Yunus dari Bangladesh. Lembaga Keuangan Mikro Bangladesh Grameen Bank yang didirikan oleh peraih Nobel Ekonomi tahun 2006 Dr. Muhammad Yunus tersebut telah berhasil menjadi penggerak roda perekonomian suatu negara. *Grameen* bank merupakan suatu bentuk perkreditan yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi orang-orang miskin agar mereka dapat membentuk permodalan dan menjalankan kegiatan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan.

Metode *grameen* bank tidak menggunakan prosedur yang biasa digunakan oleh pihak perbankan serta menerapkan persyaratan pemberian kredit yang juga berbeda dengan kalangan perbankan. *Grameen* bank tidak menetapkan harus ada jaminan benda atau orang dalam pemberian kreditnya. Demikian juga dengan cara kerja yang dilakukan, yaitu bukannya peminjam yang datang ke kantor bank melainkan petugas bank yang mendatangi para peminjam. Program *grameen* bank dalam penerapannya diharapkan mampu untuk berkomitmen memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. Dalam penanggulangan kemiskinan program *grameen* bank dianggap berhasil dengan indikator tingkat pengembalian (*repayment*) mencapai 98% mampu menaikkan pendapatan anggotanya, meningkatkan taraf hidup anggotanya, dan meningkatkan pasar tenaga kerja perempuan di Bangladesh (Gibbons, 1999: 12).

Dari keberhasilan tersebut, program grameen bank kemudian diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia program grameen bank pertama kali diujicobakan tahun 1989 melalui pilot project yang dilaksanakan oleh Pusat penelitian Agro Ekonomika, Departemen Pertanian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Asia dan Pasifik (APDC) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pilot project tersebut dinamakan Karya Usaha Mandiri (KUM), berlokasi di kabupaten Bogor, Kecamatan Nanggung, Desa Jasinga. Anggota KUM kebanyakan bekerja di sektor informal yang umumnya berusaha dalam perdagangan kecil-kecilan. Pilot project KUM juga dianggap berhasil dengan melihat tingkat pengembalian mendekati 98%, dan secara signifikan telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Dampak Dari Pinjaman Kredit	KUM di Nanggung		Rataan Umum di Pedesaan Jawa Barat
	Sebelum	Sesudah	
Peningkatan pendidikan anak laki-laki (%)	46,75	81,5	41,33
Peningkatan pendidikan anak perempuan (%)	46,25	80,5	41,63
Peningkatan Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu/bulan)	45,96	64,72	40
Pengurangan Fertilitas (%)	0	37	6
Peningkatan Tenagakerja Wanita *)	1,9	2,37	-
Peningkatan Modal Usaha Wanita (Rp.000)	50	959,3	-
Rataan Pendapatan Wanita dalam Keluarga/bulan (Rp.Ribu)	259,52	700,8	-
Peningkatan Alokasi Tenagakerja (jam kerja/orang/bulan)	233,6	303,2	-

Tabel 1.1 Dampak dari pinjaman kredit KUM kepada kesejahteraan dan ketenagakerjaan

Keberhasilan pilot project KUM, kemudian banyak dicontoh oleh lembaga lain di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang, merintis pilot project program Grameen Bank di beberapa desa di Jawa Timur. Hasil uji coba di Jawa Timur selama 3 tahun berturut-turut (1996-1998), bersamaan dimulainya pelaksanaan proyek, diperoleh kesimpulan, bahwa model ini berhasil diterapkan dengan indikator kemampuan mengangsur pinjaman beserta biaya administrasi tepat waktu, kemampuan menabung, peningkatan penghasilan, penurunan ketergantungan pada rentenir (Zain, 1998:35). Hasil kaji tindak terhadap KUM oleh *Center for Agrosocioeconomic Research Agency for Agricultural Research and Development Center (APD)* tahun 1993, menyebutkan bahwa program KUM memberikan dampak positif terhadap anggotanya, baik secara ekonomi maupun sosial. Dampak ekonominya adalah terjadinya peningkatan pendapatan dan standart hidup anggota KUM.

Di Jawa Tengah, tercatat Fakultas Ekonomi UNS merupakan salah satu perguruan tinggi yang mereplikasi grameen bank, dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat miskin. Sejak tahun 1997 fakultas tersebut telah mendirikan lembaga yang bernama Bangun Karya Central Java Project (BKCJP). Namun secara intensif baru beroperasi pada tahun 1999. Tujuannya adalah membantu orang miskin yang ada di pedesaan agar memperoleh pinjaman cepat, murah dan mudah. Diharapkan dengan bantuan tersebut orang miskin di pedesaan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Disamping itu dapat melepaskan mereka dari rentenir. Secara makro diharapkan BKCJP dapat berpartisipasi dalam



mengurangi lingkaran kemiskinan dipedesaan. Saat ini, BKCJP telah beroperasi di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Semarang.

Sehingga tahun 2012 di Surakarta didirikan Kerabat Sosial Baki Siji (KSBS) yang salah satu anggota terbesarnya berada di Kelurahan Nusukan yang merupakan replikasi dari *Grameen Bank*. Paguyuban Kerabat Sosial Baki Siji didirikan pada tanggal 12 Maret 2012 atas ide inisiatif Drs. Bambang Saroso S.E., M.Si dan Bapak Iskandar Insond Hadji. Baki Siji bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat yang melakukan usaha dalam skala mikro, sekaligus berupaya meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Baki Siji merupakan bisnis berbasis sosial bukan akumulasi yang ditekankan disini tapi saling berbagi antar sesama kelompok, mengajarkan pada kita bahwa hidup itu tidak sendirian tapi saling tolong menolong antar sesama manusia. Tujuan Baki Siji diharapkan dengan bantuan kredit/modal ini masyarakat di Kota Surakarta memiliki kemampuan untuk memberdayakan, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha. Serta tujuan kegiatan ini diharapkan bisa membangun mentalitas kejujuran, tanggung jawab, kemandirian kepada anggota. Dalam memberikan fasilitas kredit modal usaha kepada masyarakat kecil dan sektor informal Baki Siji yang berdiri tahun 2012 telah menerapkan metode *grameen bank* dalam kegiatan penyaluran kreditnya.

Berdasarkan uraian di atas melalui penelitian yang berjudul Kajian Sosial Ekonomi Eksistensi *Grameen Bank* Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Kerabat Sosial Baki Siji di Surakarta ini diharapkan dapat

mengetahui sejauh mana penerapan metode Grameen Bank yang dilaksanakan Kerabat Sosial Baki Siji (KSBS).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- Bagaimana keadaan sosioekonomi anggota Kerabat Sosial Baki Siji di Kelurahan Nusukan sebelum dan sesudah adanya program Grameen Bank?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui keadaan sosioekonomi anggota Kerabat Sosial Baki Siji di Kelurahan Nusukan sebelum dan sesudah adanya program Grameen Bank

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Bagi Pemerintah**

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam upaya mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

### **2. Bagi Pihak Lain**

Dapat memberikan informasi tambahan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian berikutnya, khususnya jika akan diterapkan untuk studi-studi dengan masalah yang sama.

